

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia berlandaskan pada visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan 8 misi Asta Cita, yang dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025-2029, dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan mengimplementasikannya melalui program prioritas berupa Pembangunan Kampung Nelayan dan Kampung Perikanan Budidaya Merah Putih.

Kampung Perikanan Budidaya merupakan kawasan yang dikembangkan berdasarkan komoditas unggulan atau lokal dengan memanfaatkan potensi wilayah untuk mendorong usaha budidaya ikan yang kompetitif dan berkelanjutan. Kawasan ini berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan dikelola secara partisipatif oleh masyarakat sehingga mampu menghasilkan produksi yang teratur dan konsisten, dimana konsepnya mencakup integrasi kegiatan dari pemberian, pembesaran, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Ciri utamanya meliputi: (a) memiliki komoditas unggulan atau lokal bernilai ekonomi tinggi sesuai kearifan lokal; (b) masyarakat menjadikan budidaya ikan sebagai sumber pendapatan utama; dan (c) terdapat kelembagaan kelompok pembudidaya yang berpotensi berkembang menjadi korporasi (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021).

Berdasarkan definisi dan karakteristiknya, Kampung Perikanan Budidaya mengadopsi konsep agribisnis, karena melibatkan seluruh rantai nilai, mulai dari pembudidayaan, pengolahan, pemasaran hingga distribusinya. Agribisnis pertama kali muncul di dalam buku Davis dan Goldberg (1957) yang berjudul “*A Concept of Agribusiness*”, dimana agribisnis didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terlibat mulai dari produksi hingga pendistribusianya, yang meliputi budidaya komoditas di lini *on-farm*, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi komoditas maupun produk yang dihasilkan dari proses pengolahan komoditas tersebut.

Perikanan budidaya merupakan subsektor strategis dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan, terutama di negara berkembang yang menghadapi peningkatan kebutuhan protein hewani dan keterbatasan sumber daya perikanan tangkap. Dalam konteks tersebut, pendekatan agribisnis menjadi penting karena memandang kegiatan budidaya tidak semata sebagai proses produksi, tetapi sebagai rangkaian aktifitas ekonomi yang saling terkait dari hulu hingga hilir. *Food Agriculture Organization* (FAO) menegaskan bahwa pengembangan akuakultur modern harus diintegrasikan dengan sistem pasar, kelembagaan, dan kebijakan agar mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan kesejahteraan pelaku, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (FAO, 2024).

Agribisnis perikanan budidaya dapat dipahami sebagai suatu sistem usaha yang mencakup penyediaan input produksi, proses budidaya, pengolahan hasil, distribusi dan pemasaran, serta berbagai jasa penunjang. Konsep agribisnis menekankan keterkaitan antarkomponen tersebut dalam satu kesatuan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing komoditas perikanan budidaya. Dengan demikian, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis produksi, tetapi juga oleh kemampuan sistem agribisnis dalam mengelola rantai nilai dan merespons dinamika pasar (Sunarno *et al.*, 2024).

Agribisnis perikanan budidaya dalam perspektif sistem tersusun atas beberapa subsistem utama, yaitu subsistem input (benih, pakan, sarana produksi, dan modal), subsistem produksi (pembenihan, pendederan, dan pembesaran), subsistem pascapanen dan pemasaran, serta subsistem pendukung berupa kelembagaan, penyuluhan, pembiayaan, dan regulasi. Kinerja masing-masing subsistem dan tingkat keterpaduannya akan menentukan efisiensi rantai pasok dan distribusi nilai tambah di sepanjang sistem agribisnis perikanan budidaya (FAO, 2024; Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023).

Secara struktural, agribisnis perikanan budidaya melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda, mulai dari pembudidaya skala kecil dan menengah, penyedia input, pedagang pengumpul, pelaku pengolahan, hingga lembaga keuangan dan pemerintah. Struktur agribisnis yang belum terintegrasi secara optimal sering menimbulkan permasalahan seperti tingginya biaya produksi, lemahnya posisi tawar pembudidaya, serta ketimpangan distribusi keuntungan. Oleh karena itu, penguatan struktur agribisnis melalui

pengembangan kelembagaan, kemitraan usaha, dan efisiensi rantai nilai menjadi agenda penting dalam pembangunan perikanan budidaya (OECD, 2025; Sunarno *et al.*, 2024).

Aspek implementasi dalam agribisnis perikanan budidaya di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses terhadap input berkualitas, fluktuasi harga pakan, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta rendahnya akses pasar dan pembiayaan. Namun demikian, peluang pengembangan tetap terbuka melalui adopsi teknologi budidaya, penguatan kelembagaan pelaku, dan penerapan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, kajian agribisnis perikanan budidaya yang menelaah secara komprehensif definisi, konsep, sistem, struktur, dan implementasinya menjadi penting sebagai dasar perumusan strategi pengembangan yang efektif dan sesuai dengan kondisi empiris wilayah penelitian (FAO, 2024; Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023).

Kabupaten Jember memiliki potensi sektor perikanan yang besar dan beragam, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan, dimana pada potensi perikanan budidaya, Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah sentra produksi ikan air tawar di Propinsi Jawa Timur, yang memiliki keunggulan komoditas ikan gurami, terutama dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah *tapal kuda*.

Ikan gurami merupakan salah satu komoditas ikan air tawar yang memiliki popularitas tinggi dan menempati posisi istimewa bagi konsumen. Gurami sering dipandang kalangan pecinta kuliner sebagai komoditas premium karena harga jualnya relatif lebih tinggi serta cita rasanya dianggap lebih unggul dibandingkan jenis ikan air tawar lainnya. Tekstur daging gurami yang renyah, memiliki sedikit duri, dan berlemak rendah menjadikannya mudah diolah serta sesuai untuk berbagai jenis masakan bernilai eksklusif (Khairuman dan Amri, 2008)

Daerah penyumbang produksi ikan gurami di Kabupaten Jember diantaranya adalah Kecamatan Umbulsari, Kecamatan Kencong, Kecamatan Semboro dan Kecamatan Bangsalsari. Salah satu kecamatan yang menarik perhatian stakeholder terkait agribisnis ikan gurami adalah Kecamatan Umbulsari, seperti kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi, bahkan tepatnya di Dusun Jatisongo Desa Tegalwangi, pada 18 September 2021 diresmikan sebagai Kampung Gurami oleh Bupati Jember. Predikat tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Umbulsari memiliki peranan penting dalam kegiatan agribisnis ikan gurami..

Tabel 1.1 Produksi Ikan Gurami di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

No	Tahun	Produksi Gurami/Tahun (Ton)		% Produksi Gurami
		Kec. Umbulsari	Kab. Jember	
1.	2020	340,45	2.411,50	14,12
2.	2021	475,45	2.742,90	17,33
3.	2022	477,85	2.834,60	16,86
4.	2023	479,21	2.765,60	17,33
5.	2024	488,73	2.819,49	17,33
Rata-rata		452,33	2.714,82	16,59

Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka (2021-2025)

Keunggulan yang dimiliki oleh Kecamatan Umbulsari selain jumlah produksi, juga memiliki keragaman usaha yang berbasis ikan gurami, mulai kegiatan pemberian, pendederan, pembesaran, penyediaan sarana produksi perikanan budidaya, bahkan rumah makan atau warung dengan menu ikan gurami tersedia di beberapa titik di Kecamatan Umbulsari.

Keragaman kegiatan agribisnis ikan gurami di Kecamatan Umbulsari yang menjadi keunggulan wilayah berpengaruh pada penciptaan atau perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah, dan perputaran ekonomi, namun pada realitanya belum tentu sejalan dengan motif atau tujuan akhirnya yakni peningkatan kesejahteraan para pelaku di dalamnya. Berdasarkan observasi lapang dan wawancara yang telah dilakukan penulis, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti harga pakan, stabilitas harga ikan gurami, pendampingan dan program pemerintah, literasi keuangan, permodalan, daya tawar pembudidaya ikan, serta hama dan penyakit ikan gurami. Kondisi tersebut relevan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 dimana permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budidaya mencakup keterbatasan ketersediaan serta distribusi induk dan benih yang unggul dan bermutu, tingginya harga pakan yang menyebabkan inefisiensi biaya produksi, munculnya penyakit, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kondisi infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung kegiatan budidaya. Selain itu, pengembangan perikanan budidaya secara berkelanjutan juga terhambat oleh adanya ketidaksinkronan regulasi baik di dalam sektor perikanan maupun antar sektor, prosedur perizinan yang masih

rumit, kelembagaan pembudidaya ikan yang belum memenuhi kriteria kelayakan perbankan, serta keterbatasan akses terhadap sumber permodalan.

Berbagai kebijakan pemerintah pusat, khususnya melalui Program Kampung Perikanan Budidaya Merah Putih, secara konseptual telah mengadopsi pendekatan agribisnis terintegrasi yang mencakup subsistem input, produksi, pascapanen, pemasaran, serta dukungan kelembagaan dan kebijakan. Sejumlah kajian dan dokumen kebijakan juga menegaskan pentingnya pendekatan sistem agribisnis dalam pengembangan perikanan budidaya untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan keberlanjutan. Namun demikian, sebagian besar kajian yang ada masih bersifat normatif dan makro, berfokus pada konsep umum agribisnis perikanan budidaya, tanpa mengkaji secara mendalam kondisi empiris di lokasi atau komoditas spesifik, khususnya pada level implementasi di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya.

Penelitian secara komprehensif yang menganalisis karakteristik agribisnis ikan gurami khususnya pada sentra usaha budidaya ikan gurami di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tercatat masih sangat terbatas. Padahal, Kecamatan Umbulsari memiliki keunggulan produksi, keragaman aktifitas agribisnis dari hulu hingga hilir, serta telah memperoleh pengakuan sebagai Kampung Gurami. Keterbatasan penelitian terdahulu terlihat dari minimnya kajian yang mengintegrasikan analisis subsistem agribisnis (input, produksi, pascapanen, pemasaran, dan kelembagaan) dengan kondisi faktual pelaku usaha, infrastruktur, dan dinamika pasar lokal.

Selain itu, meskipun terdapat peningkatan produksi ikan gurami di Kecamatan Umbulsari secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan tersebut belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan. Penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada aspek teknis budidaya atau kinerja produksi, sementara analisis mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi daya saing dan keberlanjutan agribisnis ikan gurami, seperti struktur biaya, daya tawar pembudidaya, kelembagaan, akses permodalan, serta dukungan kebijakan, masih belum banyak dikaji secara terintegrasi dalam satu kerangka analisis.

Lebih lanjut, kajian strategis yang secara sistematis merumuskan alternatif dan prioritas strategi pengembangan agribisnis ikan gurami juga masih terbatas, terutama yang mengaitkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal dengan kebijakan nasional Kampung Perikanan Budidaya. Padahal, kesenjangan antara konsep kebijakan nasional dan realitas implementasi di daerah, seperti yang terjadi di Kecamatan Umbulsari, memerlukan pendekatan analitis yang mampu menjembatani aspek konseptual dan empiris secara terukur dan aplikatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat celah penelitian berupa belum adanya kajian komprehensif yang menganalisis karakteristik agribisnis ikan gurami, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal secara sistematis, serta merumuskan prioritas strategi pengembangan berbasis pendekatan agribisnis di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi ilmiah serta rekomendasi kebijakan yang kontekstual bagi pengembangan menjadi kampung perikanan budidaya ikan gurami yang berdaya saing dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik agribisnis ikan gurami di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?
2. Faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi pengembangan agribisnis ikan gurami di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?
3. Apa alternatif strategi pengembangan agribisnis ikan gurami di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?
4. Apa strategi prioritas dalam pengembangan agribisnis ikan gurami di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilaksanakan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan karakteristik agribisnis ikan gurami di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
2. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal pengembangan agribisnis ikan gurami di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
3. Merumuskan alternatif strategi pengembangan agribisnis ikan gurami di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
4. Menentukan strategi prioritas pengembangan agribisnis ikan gurami di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi para pelaku usaha, dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan agribisnis ikan gurami.
2. Bagi instansi pemerintah, dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan program prioritas khususnya pengembangan agribisnis ikan gurami di Kecamatan Umbulsari.
3. Bagi perguruan tinggi, akan memperkaya referensi dan rujukan dalam pengembangan penelitian terkait, khususnya dalam strategi pengembangan agribisnis ikan gurami di Kecamatan Umbulsari.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha budidaya ikan gurami yang berlokasi usaha di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Aspek yang diteliti berfokus pada karakteristik agribisnis ikan gurami, serta analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi untuk merumuskan strategi prioritas pengembangan agribisnis ikan gurami di Kecamatan Umbulsari, sedangkan pengujian implementasi strategi tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Replikasi hasil penelitian ini pada daerah atau lokasi yang berbeda memerlukan pertimbangan potensi perbedaan karakteristik agribisnis, struktur

maupun keragaman mata rantai usaha, komoditas ikan, karakteristik dan budaya masyarakat, dan lain sebagainya.